

ANALISA SOSIAL EKONOMI DAN FINANSIAL  
SISTEM TUMPANGSARI  
DI LOKASI PROYEK PERHUTANAN SOSIAL  
RPH BECOK, BKPH MERAKURAK, KPH TUBAN

Oleh

Rochyana \*)

PENDAHULUAN

Pertambahan penduduk yang tinggi, khususnya di Pulau Jawa, mengakibatkan dampak kekurangan lahan pertanian (lapar lahan) untuk mencukupi kebutuhannya. Hal ini akan menyebabkan tekanan penduduk terhadap hutan semakin tinggi, apabila hubungan antara penduduk lapar lahan dengan hutan kurang baik.

Demikian pula keadaan sosial ekonomi dari masyarakat sekitar hutan, apabila sosial ekonomi masyarakat tinggi, maka hutan akan aman, sebaliknya apabila sosial ekonomi masyarakat rendah maka akan menyebabkan kerusakan terhadap hutan. Usaha yang ditujukan untuk merealisasikan hubungan yang baik antara hutan dan masyarakat sekitar hutan, adalah dilaksanakannya Program Perhutanan Sosial dengan sistem agroforestry/tumpang Sari. Salah satu Proyek Perhutanan Sosial terletak di petak 87, RPH Becok, BKPH Merakurak, KPH Tuban seluas 26 Ha. Proyek ini dimulai tahun 1986, diikuti oleh 87 pesanggem. Sebagai tanaman pokok digunakan jati ; tanaman sela digunakan lamtoro; tanaman penyangga digunakan randu; tanaman tepi digunakan mahoni, mangga dan nangka ; tanaman pagar digunakan secang; tanaman komoditi digunakan jambu mente dan sirsak/sarikaya; tanaman palawija digunakan kacang dan jagung; dan tanaman hijauan makanan ternak digunakan rumput hamil.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta secara garis besar mengetahui perubahan tingkat pengeta-

---

\*) Mahasiswa S1 Fakultas Kehutanan IPB di bawah bimbingan Ir Dudung Darusman MA dan Dr Ir Junus Kartasubrata.

huan dan persepsi pesanggem di lokasi yang diamati. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui kelayakan Program Perhutanan Sosial dengan sistem tumpangsari secara finansial, khususnya bagi pesanggem pengikut Perhutanan Sosial di RPH Becok, BKPH Merakurak, KPH Tuban.

#### METODA PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan stratifikasi kelompok rumah tangga berdasarkan luas pemilikan lahan, dimana pemilikan lahan dibagi menjadi empat strata sebagai berikut : Strata I > 0.5 Ha, Strata II 0.26 - 0.50 Ha, Strata III 0.01 - 0.25 Ha dan Strata IV tidak berlahan. Metoda penarikan contoh dilakukan secara acak berimbang sedangkan jumlah responden terpilih ditetapkan atas dasar sampling pendahuluan. Hasil perhitungan didapat jumlah responden sebanyak 30 responden, dimana sebagian besar responden berasal dari Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.

- Analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut:
- Analisa sosial, untuk mengetahui secara garis besar perubahan tingkat pengetahuan dan persepsi, digunakan kuisioner dengan uji tanda.
  - Analisa persentase, untuk mengetahui tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, digunakan rumus persentase.
  - Analisa finansial, untuk mengetahui kelayakan program Perhutanan Sosial, digunakan metoda DCF. Dalam analisa ini diperhitungkan selama 20 tahun dan digunakan asumsi faktor penurunan produktivitas lahan sebesar 0.7 serta asumsi faktor koreksi untuk mengurangi produksi buah-buahan dari produksi normal sebesar 0.7.

#### HASIL PENELITIAN

Program Perhutanan Sosial di RPH Becok, BKPH Merakurak, KPH Tuban memberikan hasil jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, berupa :

- jangka pendek, tanaman palawija (jagung dan kacang) hasilnya untuk petani.
- jangka menengah, tanaman komoditi (sirsak, nangka, mangga, jambu mente dan kapuk randu), buahnya untuk petani, pohonnya untuk Perhutani.
- jangka panjang, tanaman hutan untuk Perhutani.

Dari jawaban kuisisioner yang telah diuji dengan uji tanda dihasilkan bahwa Program Perhutanan Sosial berpengaruh nyata terhadap perubahan perilaku, dimana terjadi peningkatan pengetahuan dan persepsi bagi pesertanya.

Pengaruh Program Perhutanan Sosial terhadap pendapatan total, adalah sebagai berikut : Untuk strata I, sebesar Rp 486 250.- (42.49%) ; Untuk strata II, sebesar Rp 431 000.- (51.45 %) ; Untuk strata III, sebesar Rp 341.000.- (55.03 %) ; Untuk strata IV, sebesar Rp 254 806.- (66.12 %) ; Secara keseluruhan, sebesar Rp 359 359.- (51.88 %). Dari nilai-nilai dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi strata atau semakin rendah pemilikan lahan, sumbangan dari perhutanan sosial secara nominal semakin rendah tetapi secara prosentase semakin besar. Dari nilai-nilai ini juga ditunjukkan bahwa apabila petani tidak mendapat sumbangan dari Perhutanan Sosial, maka seluruh petani berada di bawah garis kemiskinan (garis kemiskinan setara 320 Kg beras), sedangkan dengan adanya program Perhutanan Sosial, rata-rata strata I dan Strata II berada di atas garis kemiskinan, tetapi untuk strata III dan strata IV masih berada di bawah garis kemiskinan. Adapun pengeluaran pangan dari responden yang diamati adalah sebagai berikut : Untuk strata I , sebesar Rp 497 863.- (55.69 %) ; Untuk strata II, sebesar Rp 398 250.- (58.49 %) ; Untuk strata III, sebesar Rp 338 363.- (63.05 %) ; Untuk strata IV, sebesar Rp 256 861.- (68.95 %) ; dan secara keseluruhan sebesar Rp 355 791.- (61.04 %). Dari nilai-nilai ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi strata, pengeluaran untuk pangan secara nominal semakin rendah tetapi secara prosentase semakin tinggi.

Selanjutnya pengeluaran per kapita rata-rata peserta program Perhutanan Sosial di RPH Becok, adalah sebesar Rp 113 367.-. Menurut Sajogyo (1977) mengenai Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan, nilai Rp 113 367.- (setara dengan 252 kg beras, karena 1 kg beras sama dengan Rp 450.-) termasuk pada klasifikasi miskin. Secara terperinci komposisi peserta Program Perhutanan Sosial dengan garis kemiskinan adalah sebagai berikut : 10 orang (33.33 %) berada di atas garis kemiskinan, dengan jumlah pengeluaran lebih dari 320 kg nilai tukar beras; 5 orang (16.67 %) berada pada klasifikasi miskin, dengan jumlah pengeluaran antara 240 sampai 320 kg nilai tukar beras; 5 orang (16.67 %) berada pada klasifikasi miskin sekali, dengan jumlah pengeluaran antara 180 sampai 240 kg nilai tukar beras; dan 10 orang (33.33 %) berada pada klasifikasi paling miskin, dengan jumlah pengeluaran di bawah 180 kg nilai tukar beras.

Untuk strata I, rata-rata pengeluaran per kapit adalah sebesar Rp 153 259.-. Nilai ini termasuk pada klasi-

fikasi di atas garis kemiskinan. Adapun komposisinya adalah sebagai berikut : 4 orang (66.67 %) berada di atas garis kemiskinan; masing-masing 1 orang (16.67 %) berada pada klasifikasi miskin dan paling miskin.

Untuk Strata II, rata-rata pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 136 188.-. Nilai ini termasuk klasifikasi miskin. Adapun komposisinya adalah sebagai berikut: 2 orang (40 %) berada di atas garis kemiskinan; masing-masing 1 orang (20 %) berada pada klasifikasi miskin, miskin sekali dan paling miskin.

Untuk strata III, rata-rata pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 111 801.-. Nilai ini termasuk klasifikasi miskin. Adapun komposisinya adalah sebagai berikut : masing-masing 3 orang (30 %) berada pada klasifikasi di atas garis kemiskinan, miskin dan paling miskin; 1 orang (10 %) termasuk klasifikasi miskin sekali.

Untuk strata IV, rata-rata pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 81 767.-. Nilai ini termasuk klasifikasi miskin sekali. Adapun komposisinya adalah sebagai berikut : 1 orang (11.11 %) berada di atas garis kemiskinan kemiskinan; 3 orang (33.33 %) termasuk klasifikasi miskin sekali; dan 5 orang (55.55 %) termasuk klasifikasi paling miskin.

Dari ketiga kriteria kelayakan yang digunakan yaitu NPV, BCR dan IRR terlihat bahwa kelayakan secara ekonomi bagi proyek secara keseluruhan, dan secara finansial bagi petani di dapat nilai yang cukup tinggi. Untuk proyek di dapat nilai NPV sebesar Rp 40 386 003.- dan nilai BCR sebesar 1.54 (asumsi nilai suku bunga Bank yang berlaku 25 %), sedangkan nilai IRR sebesar 79.92 %. Secara finansial untuk petani di dapat nilai NPV sebesar Rp 52 529 042.- dan nilai BCR sebesar 1.84 sedangkan IRR sebesar 123.22 %. Diperkirakan pada waktu 20 tahun nilai suku bunga tidak akan melewati nilai tersebut, maka dapat dikatakan Program Perhutanan Sosial di RPH becok, BKPH Merakurak, KPH Tuban, layak secara finansial untuk petani dan layak secara ekonomi untuk proyek secara keseluruhan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pada perubahan perilaku, program Perhutanan Sosial di RPH Becok berpengaruh nyata, dimana terjadi peningkatan pengetahuan dan persepsi bagi pesertanya.

Pengaruh program Perhutanan Sosial terhadap pendapatan total berkisar antara 42.49 % sampai 66.12 %. Semakin rendah pemilikan lahan, sumbangan dari Perhutanan Sosial secara nominal semakin rendah tetapi secara prosentase semakin besar.

Adapun pengeluaran pangan berkisar antara 55.69 % sampai 68.95 % dari pengeluaran totalnya, dimana semakin rendah pemilikan lahan pengeluaran pangan secara nominal makin rendah tetapi secara persentase semakin tinggi.

Pengeluaran per kapita rata-rata untuk strata I termasuk klasifikasi di atas garis kemiskinan; untuk strata II dan strata III termasuk klasifikasi miskin; untuk strata IV termasuk klasifikasi sangat miskin; sedangkan secara keseluruhan termasuk klasifikasi miskin.

Kelayakan secara ekonomi bagi proyek secara keseluruhan dan secara finansial bagi petani didapatkan nilai yang cukup tinggi, dimana IRR untuk petani sebesar 123.22 % dan IRR untuk proyek sebesar 79.92 %. Maka dapat dikatakan Program Perhutanan Sosial di RPH Becok, BKPH Merakurak, KPH Tuban layak secara finansial untuk petani dan layak secara ekonomi untuk proyek secara keseluruhan.

#### Saran

Dari hasil penelitian terlihat bahwa Program Perhutanan Sosial di RPH Becok berpengaruh nyata, baik terhadap pendapatan, tingkat kesejahteraan maupun perilaku petani. Dengan keberhasilan ini peneliti menyarankan pengembangan lebih lanjut di daerah lain, khususnya di KPH Tuban. Hal ini selain menguntungkan masyarakat sekitar hutan, juga dapat dijadikan pemecahan masalah reboisasi, dimana pada saat ini banyak reboisasi di KPH Tuban mengalami kegagalan.

Meskipun sistem tumpang-sari di lokasi Perhutanan Sosial mengalami keberhasilan, tetapi dari hasil penelitian terlihat bahwa semakin rendah pemilikan lahan hasil dari perhutanan sosial semakin kecil, padahal pada strata tersebut peranan Perhutanan Sosial harus lebih besar. Dalam hal ini peneliti menyarankan pada golongan pemilikan lahan yang rendah diberikan lahan garapan yang lebih luas, misalnya 0.5 Ha, sehingga pendapatan golongan tersebut akan semakin besar.

Diperlukan penelitian mengenai aspek silvikultur di lokasi Perhutanan Sosial, karena banyaknya tanaman dalam satu areal diperlukan penanganan yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1987. Program Pengembangan Perhutanan Sosial di Indonesia. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Kadariah, L. Karlina, dan C. Gray. 1978. Pengantar Evaluasi Proyek. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Patong, D. dan A. Soehardjo. 1973. Sendi-Sendi Pokok Usaha Tani. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian IPB. Bogor.
- Sajogyo. 1977. Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB. Bogor.